

TESIS

**PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN DANAU
MANINJAU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Dua (S2) Pada Magister Ilmu Hukum*



Diajukan Oleh:

MELIA RIZKI RUSWANDI

2020112081

Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN DI
WILAYAH SEMPADAN DANAU MANINJAU OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM
ABSTRAK**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Danau merupakan salah satu sumber air yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki nilai strategis dari berbagai aspek, baik itu ekonomi, ekologi, sosial budaya maupun ilmu pengetahuan. Danau Maninjau saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi/sendimentasi, pendangkalan, dan punahnya biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian Danau Maninjau. Diperlukan instrument hukum yang mengatur mengenai kelestarian Danau Maninjau. Terjadinya Kerusakan kelestarian danau Maninjau, maka Pemerintah menjadikan Danau Maninjau sebagai salah satu Danau Prioritas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional guna memulihkan dan mengembalikan kondisi serta fungsi danau. Salah satu penyebab kerusakan kelestarian Danau Maninjau adalah banyaknya bangunan yang berdiri di Sempadan Danau. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Bagaimana Pengaturan Terhadap Bangunan Di Wilayah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam Dihubungkan Dengan Program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional? 2) Bagaimana pengawasan terhadap izin pendirian Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam? 3) Bagaimana upaya pemerintah dalam Melaksanakan Penegakan hukum berkaitan dengan Larangan Mendirikan bangunan rumah di sempadan danau maninjau? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis Empiris, bersifat deskriptif analisis dan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian merumuskan: 1) Danau Maninjau salah satu wilayah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam dan menjadi salah satu Danau Prioritas Nasional yang di atur dalam Perpres 60 Tahun 2021 Tentang penyelamatan Danau Prioritas Nasional. 2) Menurut data yang didapat dari penelitian di lapangan dengan pemerintah dan dinas terkait, bangunan yang dibangun di sempadan danau maninjau kebanyakan adalah bangunan lama yang berdiri sebelum terbitnya aturan mengenai kawasan danau, sehingga bangunan tersebut tidak sesuai dengan RTRW dan belum memiliki izin bangunan. 3) Pengawasan terhadap bangunan di kawasan Danau belum maksimal berjalan, banyak terdapat kendala dalam penerapan aturannya dan belum maksimal pemberian sanksi terhadap bangunan yang tak sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata ruang dan kelestarian Danau Maninjau.

Kata Kunci : Pengawasan Izin Bangunan, RTRW, Danau Prioritas Nasional